

NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KOMANDO DISTRIK MILITER 0501/JAKARTA PUSAT BERDIRI SENDIRI (KODIM 0501/JP-BS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

Jamal Mubin, Robert Mubarrod, M. IP, Pangi Syarwi, M.IP.

Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

Email : jamalscorpiopi@gmail.com

Abstract

This research wants to know how the neutrality of the TNI in the area of Military District Command 0501 / Central Jakarta-Stand Alone (KODIM 0501 / JP-BS) in the 2019 presidential election from the perspective of political communication. From this research, it was found that the neutrality of the TNI soldiers from Kodim 0501 / JP-BS was good. There were no cases of violations of neutrality committed by soldiers of Kodim 0501 / JP-BS during the 2019 presidential election. To make soldiers maintain neutrality is the ability of all soldiers to uphold orders and instructions from the TNI Commander regarding TNI's neutrality in politics. The neutrality of the TNI is very important to be studied, because at the presidential general election there was a retired officer who advanced to become a presidential candidate, and there was tested the neutrality of the TNI. Based on the results of research by conducting interviews, it was found that there was no influence of a retired TNI officer running for president on the neutrality of TNI soldiers Kodim 0501 / JP-BS.

Keywords : Neutrality, Presidential Election, Political Communication

Abstrak

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana netralitas TNI di wilayah Kodim 0501/Jakarta Pusat-Berdiri Sendiri (KODIM 0501/JP-BS) pada Pilpres 2019 dari perspektif komunikasi politik. Dari penelitian ini diketahui bahwa netralitas prajurit TNI dari Kodim 0501/JP-BS sudah baik. Tidak ada kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan prajurit Kodim 0501/JP-BS selama Pilpres 2019. Untuk menjaga netralitas prajurit adalah kemampuan seluruh prajurit untuk menegakkan perintah dan instruksi Panglima TNI tentang netralitas TNI dalam politik. Netralitas TNI sangat penting untuk dikaji, karena pada pemilihan umum presiden ada seorang pensiunan perwira yang maju menjadi calon presiden, dan di sana diuji netralitas TNI. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara, ditemukan bahwa tidak ada pengaruh pensiunan perwira TNI mencalonkan diri sebagai presiden terhadap netralitas prajurit TNI Kodim 0501/JP-BS.

Kata Kunci : Netralitas, Pemilihan Presiden, Komunikasi Politik

PENDAHULUAN

Peristiwa berakhirnya era orde baru tahun 1998 telah menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia, salah satunya berdampak pada perubahan peran militer dalam politik, yakni berupa reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Dari era reformasi ini terjadi proses penarikan diri institusi militer dari politik, kongkritnya yaitu penghapusan Dwifungsi aparat pertahanan, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Era sebelumnya, yakni orde baru disebutkan bahwa Dwifungsi ABRI menempatkan tentara berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional, seperti sebagai anggota legislatif pada Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), baik di tingkat propinsi ataupun kabupaten/kota, pejabat administratif birokrasi non militer, petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepala desa sampai pejabat kepala daerah yang juga sering diduduki tentara dinas aktif¹.

Menurut Agus Widjojo² bahwa Reformasi TNI telah dapat menyelesaikan hal-hal yang paling penting, yaitu penghapusan Dwifungsi dengan wujud implementasi melepaskan peran sosial politik TNI, tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan kekuasaan sebagai bagian dari Golongan Karya (Golkar), melikuidasi Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR dan DPRD, serta melepaskan doktrin dengan tidak lagi memposisikan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil.

Agus Widjojo³ menganggap bahwa setelah terjadinya reformasi TNI, tidak berarti bahwa anggota TNI telah dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila ia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilihan umum (pemilu), ia sudah harus melepaskan status dinas aktif anggota TNI.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa implikasi yang sangat penting terhadap peran dan posisi TNI di dalam Politik⁴. Pasca orde baru, negara melakukan reformasi besar dengan menghilangkan dwi fungsi militer di Indonesia. Hampir sama dengan mayoritas negara yang menjalankan demokratisasi yaitu ada tuntutan TNI untuk profesional dan kembali pada ranahnya dalam hal menjaga keamanan negara.

¹ Arie S. Soesilo, *Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI*, dalam Masyarakat Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, hal. 196

² Agus Widjojo, *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*, (Jakarta: Grafindo, 2015), hal. xvi

³ Agus Widjojo, *op.cit.*, hal. 508H

⁴ Indra Samego, *Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwi-Fungsi ABRI*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1998), hal. 20

Maka TNI bekerja keras untuk melakukan diskusi internal tentang apa yang harus dilakukan dimasa pemerintahan baru itu⁵. Puncaknya terjadi 1 April 1999 terdapat pemisahan Polisi dari tubuh ABRI. Sejak saat itu tidak lagi digunakan istilah ABRI, yang lalu digantikan jadi TNI. Historis ini dinilai cukup signifikan dengan adanya pengumuman yang dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S. pada tanggal 20 April 2000 tentang penghapusan peran sosial politik TNI yang sudah lama dipegangnya. TNI lebih fokus pada ranah pertahanan.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka babak baru bagi TNI telah dimulai. TNI tidak lagi aktif dalam kegiatan politik. TNI harus menjaga netralitasnya dalam setiap perhelatan politik apapun di negara ini. Untuk mempertegas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah mengesahkan UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni TNI bersikap netal dalam perpolitikan serta tidak akan melibatkan diri dengan kegiatan perpolitikan secara praktis⁶.

Militer adalah suatu profesi sukarela, dimana setiap individu yang bekerja didalamnya bersifat memaksa yang disebabkan karena anggota militer tidak diberikan kebebasan berkumpul ataupun membentuk suatu perkumpulan secara sukarela. Akan tetapi, harus selalu terbatas kepada suatu situasi hirarkhi, birokrasi⁷.

Selanjutnya Eric A. Nordlinger, (1994:30) menjelaskan fenomena campur tangan militer dalam politik bahwa seorang pretorian akan menunjukkan diri mereka sebagai perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa nasional. Peneliti Samuel Huntington berpendapat bahwa melalui pengamatannya menyatakan penyebab keikutsertaan militer dalam politik terjadi melalui beberapa aksi kudeta kedalam sistem yang disebut dengan sistem politik⁸. Maka dalam bukunya *the soldier and state* (1957:83), ia memformulasikan bentuk kontrol terhadap militer yaitu *subjective military control* yang diterapkan oleh negara-negara totalitarian dalam relasi kekuasaan politik (partai politik) terhadap institusi militer.

Militer secara peran dan posisi seperti yang dijelaskan diatas akan terbentuk oleh arus demokratisasi yang berlangsung pada sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang memasuki tahapan demokratisasi pasca orde baru menjadikan demokratisasi untuk landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara, termasuk juga untuk menilai dan melihat bagaimana

⁵ Ster TNI dan PuSDeHaM, *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Ster TNI, 2007), hal 30-31

⁶ *Buku saku Netralitas TNI*, (Jakarta : Mabes TNI, 2008) hal. 1

⁷ Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, (2002), hal. 2

⁸ <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=83518&lokasi=local>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021

sebuah negara melaksanakan kebijaksanaannya karena kebijaksanaan menentukan kehidupan rakyat⁹. Maka demokrasi merupakan suatu pengorganisasian sebuah negara secara mandiri alias dilakukan oleh rakyat negara tersebut atau dengan dasar persetujuannya seluruh rakyat, sebab rakyat memiliki kedaulatan penuh terhadap negara¹⁰.

Demokratis adalah suatu sistem dari politik yang menunjukkan bahwa semua hal yang menyangkut tentang kebijakan secara umum sangat tergantung atas persetujuan mayoritas rakyat melalui wakil-wakil yang oleh rakyat dipilih dalam pemilihan umum dan diawasi yang berdasarkan kepada pokok-pokok persamaan politik secara prinsip serta terselenggara secara bebas untuk menjamin kebebasan politik itu sendiri¹¹.

Pemilihan berkala yang biasa disebut pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang pertama kali digagas dan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 dalam masa pemerintahan Ir.Soekarno. Pada saat pemilihan umum, ada mekanisme yang dapat kita lakukan dalam upaya membuat pemilihan umum secara adil dan bebas. *Pertama*, menciptakan seperangkat tata cara, metoda ataupun beberapa peraturan dengan tujuan memberikan transfer terhadap pemilih yang memiliki suara kedalam sebuah lembaga yang dinamakan dengan perwakilan rakyat dengan adil (electoral system). Berikutnya yang *kedua*, melaksanakan proses pemilihan umum yang berdasarkan dengan semua peraturan serta seluruh prinsip yang ada (electoral process)¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 145 menyatakan bahwa “dalam Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih” ini artinya salah satu faktor yang diharuskan TNI untuk bersifat netral dari semua hal tentang perpolitikan sejalan sama peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan sikap netralitasnya TNI tidak dibenarkan memihak apalagi memberi bantuan kepada konstituan Pemilu maupun partai dan TNI harus menjaga jarak dan tidak dipengaruhi untuk dijadikan alat Politik oleh kepentingan partai. Kebijakan supremasi sipil mengatur ketidaklibatan militer dalam politik dan tercantum dalam pasal 2 huruf d UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Semua dapat diwujudkan melalui semua daya dan upaya dari elemen militer, terutama pimpinan militer yang sangat bertanggungjawab terhadap seluruh prajurit dengan proses serta

⁹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 207

¹⁰ Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*, (Jakarta: LPS, 1984), hal. 71

¹¹ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York : Oxford University Press, 1960), hal. 70

¹² Ster TNI dan PuSDeHaM, *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Ster TNI, 2007), hal. 44

sistem komando. Para komandan/kepala satuan dinas melakukan sosialisasi tentang menjaga aparat TNI tetap netral dalam pemilu baik bagi anggota maupun keluarga satuan TNI pada setiap upacara atau saat jam kerja secara periodik.

Komandan juga wajib melakukan pengecekan secara berkala serta bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap anggota TNI tentang netralitas, bahkan mereka juga wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh prajurit serta anggota keluarga mereka saat berada ditengah-tengah. Semua dilakukan dengan tujuan mencegah peluang aparat TNI melakukan kegiatan perpolitikan secara praktis.

Untuk mereka yang menjadi komandan ditingkat satuan dilimpahkan untuk wajinb mensanksi setiap anggota yang terbukti telah melanggar aturan dan wajib mematuhi semua aturan. Hubungan hierarki mengharuskan prajurit mematuhi komandan yang tertuang dalam sumpang prajurit. Netralitas yang terjamin dalam pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan yang dilakukan untuk mempertegas bahwa TNI membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta pemilu. Selanjutnya membuktikan netralitas juga terlihat dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya tak ada pemasangan identitas peserta pemilu di lingkungan markas, asrama dan fasilitas TNI lain.

Disamping menjaga netralitas, profesionalitas terkait keamanan pemilu dilakukan oleh TNI supaya waspada kepada daerah yang berpotensi rawan konflik. Tindakan antisipasi dilakukan dengan cara temu dan lapor cepat secara hierarki apabila ada indikasi kejadian yang mengarah pada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu. Kewajiban menjaga keamanan pada masa pemilu tetap dilakukan tanpa terlibat tindakan berupa komentar, penilaian, diskusi dan arahan terkait kontestan peserta Pemilu kepada keluarga dan masyarakat.

Pemilu merupakan wadah untuk warga negara dalam melaksanakan aspirasi politiknya secara demokratis, sehingga bebas menentukan hak pilih terhadap kontestan yang dianggap mampu menyalurkan aspirasi politiknya. Jaminan kebebasan tanpa pemaksaan kehendak, terror atau intimidasi menjadi tumpuan masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa netralitas yang diterapkan oleh TNI sudah cukup baik dilihat dari tanggapan masyarakat yang sangat mendukung dan mengharapkan terciptanya demokrasi yang bersih. Namun sebagian masyarakat belum memahami makna netralitas TNI karena sebagian masyarakat masih apatis tentang peraturan pemerintah terutama dampak konflik dan hubungan militer dan masyarakat yang berjarak akibat rasa takut. Dampak dari

pemberlakukan netralitas TNI bagi masyarakat ialah masyarakat merasakan kebebasan memilih memilih tanpa adanya rasa takut dan tekanan yang menjadi dilema bagi masyarakat itu sendiri.

Agar netralitas TNI dapat dipahami oleh masyarakat luas serta bisa dipatuhi anggota TNI, maka salah satu caranya adalah TNI selalu mengkampanyekan dan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi TNI pasca dihapuskannya Dwifungsi ABRI. Proses mengkampanyekan dan mensosialisasikan hal tersebut dinamakan dengan proses komunikasi politik.

Tahun 2019 menjadi tantangan bagi TNI untuk mewujudkan netralitasnya. Hal ini disebabkan oleh majunya salah seorang pensiunan TNI atau purnawirawan TNI menjadi salah satu kandidat calon presiden. Namun, dibalik itu semua, pada tahun 2019 juga ditandai perkembangan sosial media yang massif, sehingga proses untuk melakukan komunikasi politik antara TNI dengan sesama TNI menjadi lebih massif.

Selayaknya sebuah institusi negara dan dengan tujuan tetap menjaga netralitas, TNI juga cukup banyak melakukan komunikasi politik. Hampir dalam setiap kesempatan, selaku pimpinan tertinggi dari TNI, Panglima TNI menekankan perlunya netralitas bagi prajurit TNI. Tak terkecuali dalam menghadapi pemilihan umum presiden tahun 2019 lalu. Terlebih pada saat itu, tantangan untuk tetap memastikan jika prajurit TNI menjaga netralitas semakin berat. Sebab, pertarungan politik tahun 2019 yang memilih presiden beserta wakil presiden terkonsentrasi kedalam dua kubu, yakni kubu pendukung presiden petahana, Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin, sedangkan pasangan calon presiden serta wakil presiden lainnya adalah Prabowo Subianto yang notabene merupakan mantan prajurit TNI, dengan pasangannya Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebagai institusi vertikal atau satu komando, maka instruksi ataupun himbauan untuk berlaku netral yang dilakukan oleh Panglima TNI harus dipatuhi seluruh jajaran TNI kebawahnya, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan bahkan sampai desa. Semua dilakukan demi memastikan bahwa seluruh prajurit TNI memang tetap berlaku netral dan menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang ada.

Sebagai bagian dari salah satu institusi TNI yang berada ditingkat kotamadya, Komando Distrik Militer 05/01 Berdiri Sendiri Jakarta Pusat (Kodim 05/01 JP-BS). Akan menjadi tantangan yang berat bagi seluruh prajurit di wilayah Kodim 05/01 JP-BS agar mempertahankan netralitas mereka saat perhelatan pemilihan presiden 2019. Betapa tidak, dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan serta pusat ibukota negara, netralitas anggota TNI yang berada di Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS) sangat diuji.

Dan disinilah diuji juga bagaimana sebuah institusi melakukan proses komunikasi politik kepada seluruh jajaran prajurit TNI di wilayah Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS).

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang netralitas TNI dalam perspektif komunikasi politik yang penulis tuangkan kedalam skripsi dengan judul *“Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (KODIM 05/01 JP-BS) Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 Dalam Perspektif Komunikasi Politik”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk mempelajari suatu gejala atau realitas sosial dan mencoba menemukan suatu pemahaman akan interpretasi, atau makna terhadap gejala tersebut. Sugiyono menjelaskan bahwa metode analisis kualitatif bila kondisi yang akan diteliti masih remang-remang sehingga memerlukan penjelasan yang lebih dalam agar dapat menemukan masalah secara jelas. Dalam prosedur penulisannya bahwa data dituliskan berbentuk kalimat, kata dan gambar¹³.

Berdasarkan apa yang dikerjakan oleh penulis bahwa penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk memahami mengenai keterlibatan pensiunan TNI dalam politik apakah mempengaruhi netralitas TNI secara institusi sebagai bagian dari komitmennya atas reformasi TNI, untuk menganalisa efektifitas media komunikasi yang dipakai oleh institusi TNI agar TNI tetap bersikap netral dalam pilpres tahun 2019, untuk menganalisa strategi, cara, dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh institusi TNI agar TNI tetap bersikap netral dalam pilpres tahun 2019.

Bahan penelitian atau obyek penelitian adalah Institusi TNI, dengan unit analisisnya adalah mengenai netralitas TNI dalam Pilpres 2019. Melalui pemahaman akan obyek penelitian dan unit analisis ini maka akan mempermudah proses pengumpulan data, proses pencarian informan, dan proses analisis data dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 245-248

Data adalah suatu model pengumpulan data yang akan dilakukan pengolahan dan analisis melalui metode tertentu yang setelahnya akan menghasilkan suatu hal yang mengindikasikan dan menggambarkan sesuatu. Dalam penelitian ini datanya berbentuk kalimat, narasi dari subjek atau informan penelitian yang didapat dengan teknik pengumpulan data yang setelah itu data akan dianalisis dan diolah menggunakan teknik analisa data kualitatif serta menghasilkan sebuah temuan atau hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan¹⁴.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan dari sumber pertama atau dari informan. Dalam penelitian ini bahwa tentunya peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif seperti dokumen publik, misalnya: surat kabar, makalah, jurnal, internet, maupun laporan peneliti terdahulu dan juga dari dokumen privat misalnya: *e-mail*, buku, Jurnal, Makalah dalam Seminar, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis,¹⁵ dengan melakukan metode mengumpulkan data dan informasi melalui riset kepustakaan (*library research*). Metode deskriptif analisis ini mengharuskan beberapa langkah pengumpulan dan pengorganisasian data yaitu: pertama, perumusan dan penjabaran konsep-konsep yang dipakai didalam penelitian. Ini harus dilakukan untuk membatasi lingkup data yang harus dikumpulkan. Kedua, setelah dikumpulkan, data diorganisasi dan dikategoriasasi berdasarkan rumusan konsep-konsep itu. Ketiga, data yang sudah diorganisasi yang meliputi deskripsi tersebut, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk penelitian ini tentu saja yang terkait dengan tema, seperti, buku-buku mengenai militer dan politik di Indonesia, perkembangan mengenai hubungan sipil dan militer, dokumen tertulis yang dikeluarkan institusi TNI mengenai Netralitas TNI, dan sebagainya.

Pengumpulan data yang bersifat primer adalah melalui pernyataan institusi TNI mengenai netralitas prajurit TNI di Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS) untuk tetap bersikap netral pada pilpres tahun 2019. Pernyataan tersebut didapatkan dari wawancara perwakilan institusi TNI Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS). Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan pengamat militer.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 116.

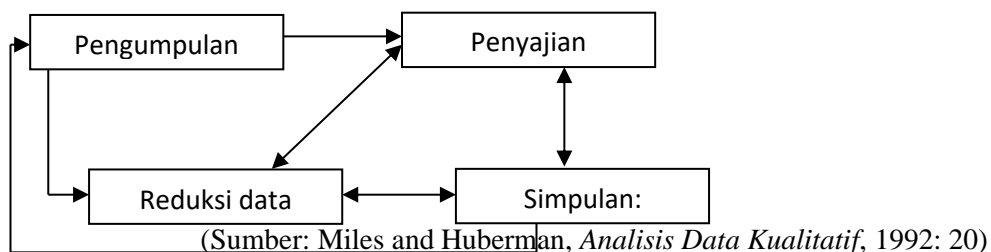
¹⁵ Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Dalam melakukan prosedur analisis data, bahwa data yang telah berhasil terkumpul oleh penulis, kemudian diseleksi atas dasar kontribusi dari setiap data terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan dari institusi TNI Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS) secara resmi dan data hasil penelusuran pustaka mempunyai posisi yang sama pentingnya sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, semua data yang berhasil terkumpul melalui kedua teknik pengumpulan data tersebut masing-masing saling mengontrol dan mengkonfirmasi atas yang lain. Sesuai pandangan Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif data yang berhasil dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data akan dianalisis melalui tiga tahapan sebagai berikut :¹⁶

Gambar 1

Bagan Komponen-Komponen dan Proses Analisa Data¹⁷



Hasil analisis terhadap data yang terkumpul tersebut kemudian diberikan interpretasi teoritik untuk menjelaskan Netralitas TNI di Kodim 05/01 Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (JP-BS) dalam Pilpres 2019 dalam Perspektif Komunikasi Politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Kodim yang berada di wilayah pusat Jakarta, maka Kodim 0501/JP-BS merupakan institusi TNI yang sangat strategis. Oleh sebab itu, komunikasi politik yang dibangun oleh Kodim 0501/JP-BS sangat penting demi menjaga netralitas prajurit.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Pejabat Sementara (PJS) Perwira Intel (Pasiintel) Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dalam wawancara¹⁸ :

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hal. 407

¹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hal. 20

Komunikasi Politik yang dibangun oleh Kodim 0501/JP-BS memang komunikasi yang berjenjang yang dalam hal ini adalah komunikasi dari atas sampai kebawah. Segala hal yang menyangkut tentang politik, seluruh prajurit satu suara atas dasar instruksi dari atas atau satu rantai komando. Dimulai dari Panglima TNI, KSAD, Pangdam Jaya, Dandim, Danramil hingga Babinsa.

Berdasarkan penuturan PJS Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dapat dikatakan bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh Kodim 0501/JP-BS adalah komunikasi vertikal dan komunikasi satu arah, dengan kata lain komunikasi yang dibangun adalah komunikasi politik yang berdasarkan struktur tertinggi.

Komunikasi politik yang terjadi mengindikasikan bahwasanya Kodim 0501/JP-BS tetap dalam satu komando yang jelas, sehingga seluruh komunikasi pun sangat jelas. Termasuk komunikasi yang dilakukan oleh seluruh prajurit.

Bentuk komunikasi politik yang terjadi adalah agitasi politik. Artinya bergerak atau menggerakkan. Dalam hal ini, Panglima TNI sebagai puncak pimpinan dari TNI menggerakkan seluruh prajurit TNI dari tingkat tertinggi sampai terendah. Sebab, agitasi memfokuskan diri kepada kelompok-kelompok kecil. Bisa dibilang lebih kepada spesifik grup. Dan didalam spesifik grup ini, tujuan mereka adalah membahas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok mereka sendiri.

Dalam hal ini, Kodim 0501/JP-BS yang merupakan bagian dari kelompok institusi TNI tetap mempertahankan komunikasi politik yang dibangun dari Panglima TNI dengan tetap patuh dan tunduk terhadap perintah, instruksi serta komunikasi yang dibangun oleh Panglima TNI.

Untuk permasalahan strategi komunikasi politik yang dibangun, Kodim 0501/JP-BS tetap berpegang teguh terhadap kebijakan pimpinan dan tidak memiliki rencana sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Pasiintel Kapten Inf Tatang Supardi dalam wawancara:

Seluruh komunikasi politik yang ada merupakan gambaran dari setiap kebijakan pimpinan. Selain kebijakan pimpinan, kebijakan negara itu yang dijalankan. Tidak memiliki rencana sendiri dan selalu bersinergi dengan pihak pemerintah.

¹⁸ Wawancara dengan Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang S pada hari Senin 15 Februari 2021

Dengan kondisi yang seperti itu, setiap kebijakan pemerintah dan kebijakan negara merupakan bentuk dari komunikasi politik yang dijalankan oleh Kodim 0501/JP-BS. Komunikasi politik yang dijalankan oleh Kodim 0501/JP-BS merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan tertinggi. Komunikasi politik yang dijalankan oleh Kodim 0501/JP-BS merupakan kebijakan pimpinan dan kebijakan negara.

Tidak ada satupun komunikasi politik yang dilakukan oleh Kodim 0501/JP-BS diluar dari rencana atau memiliki rencana sendiri. Dan seluruh komunikasi yang dilakukan selalu bersinergi dengan pihak pemerintah.

Sementara itu, jika terdapat prajurit yang melakukan komunikasi politik tambahan atau terlihat tidak netral pasti akan disanksi dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, terkadang ada-ada saja isu yang menjerpa perihal netralitas prajurit TNI Kodim 0501/JP-BS. Seperti penuturan dari Pjs Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dalam wawancara:

Kadang-kadang diisukan, terutama Babinsa. Padahal, Babinsa harus selalu berada ditengah-tengah warga. Dan terkadang kehadiran Babinsa ditengah warga tersebut yang akhirnya diisukan jika Babinsa itu tidak netral atau mengajak warga untuk memilih pasangan tertentu dalam perhelatan pemilihan presiden. Padahal, Babinsa bekerja sudah sesuai dengan perintah pimpinan atas dan berpedoman dengan perintah.

Dari penuturan Pjs Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dapat dikatakan jika babinsa merupakan prajurit yang kadang-kadang disukan tidak netral. Sebab, babinsa merupakan prajurit TNI garda terdepan yang membina desa. Babinsa merupakan prajurit TNI yang harus selalu berada ditengah-tengah warga. Namun, akibat sering berada ditengah-tengah warga membuat babinsa menjadi daya tarik politik sendiri yang membuat masyarakat mengisukan babinsa terlibat dalam politik praktis atau tidak netral lagi. Padahal, babinsa bekerja sudah sesuai dengan perintah pimpinan atas dan berpedoman dengan perintah.

Walaupun TNI tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang politik masa lalu pada saat masih Dwifungsi dan ada salah seorang purnawirawan TNI yang maju menjadi calon presiden, namun netralitas TNI Kodim 0501/JP-BS harus tetap dijaga, karena memang menurut Pasiintel Kodim 0501/JP-BS dalam wawancara:

Sudah dari dulu sejak orde lama sampai orde baru TNI berpolitik. Namun, pasca orde baru TNI tidak lagi berpolitik. Bagi prajurit TNI yang masih aktif tetap acuannya kebijakan dari Panglima TNI. Fungsi TNI sekarang lebih difokuskan sebagai aparat territorial. Masalah politik tugas TNI adalah melakukan monitor, mendengarkan dan mengamankan. Siapa pun yang menang kita tidak ikut campur dan ada batasan-batasannya.

Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran sebagian kalangan persoalan netralitas TNI dalam menghadapi pemilihan umum presiden pada tahun 2019 tidak menjadi kenyataan. TNI sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Setelah penghapusan dwifungsi ABRI, memang TNI lebih banyak berada dalam wilayah teritorial. Hal ini diungkapkan juga oleh salah seorang purnawirawan TNI yang menjadi saksi bagaimana TNI yang sekarang dan TNI yang dahulu, yakni Mayjen TNI (Purn) Tatang Zainudin dalam wawancara¹⁹:

Bisa saja terjadi, namun kemungkinan terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang terkait netralitas TNI karena sejak masa reformasi dan penghapusan Dwifungsi ABRI, TNI tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik dan perpolitikan praktis.

Jadi, walaupun ada purnawirawan yang menjadi salah seorang calon presiden, namun TNI tetap bersikap netral. Sebab, netralitas TNI harus selalu dijaga utuh. Tidak boleh ada lagi prajurit TNI yang aktif ikut terlibat dalam kegiatan politik dan perpolitikan praktis. Untuk mempertegas hal tersebut, Kodim 0501/JP-BS berkomitmen untuk menjaga prajurit tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut Pjs Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dalam wawancara:

Walaupun ada salah seorang purnawirawan yang jadi calon presiden pada pemilihan umum presiden tahun 2019, namun Kodim 0501/JP-BS tetap berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi netralitas. Sesuai dengan perintah dari atasan, yakni Panglima TNI bahwasanya netralitas prajurit Kodim 0501/JP-BS mulai dari tingkat babinsa, koramil hingga seluruh prajurit yang berdinis di Kodim 0501/JP-BS harus selalu dijaga.

¹⁹ Wawancara dengan Mayjen TNI (Purn) Tatang Zainudin pada tanggal 16 Februari 2021

Dapat disimpulkan bahwasanya netralitas prajurit TNI Kodim 0501/JP-BS dari tingkatan babinsa, koramil yang terdiri dari 8 koramil dan prajurit yang berdinasi di Kodim 0501/JP-BS tetap dijaga sesuai dengan perintah atasan, yakni Panglima TNI yang menegaskan jika netralitas TNI dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 adalah harga mati dan selalu dijaga, sebab politik TNI adalah politik negara. Sementara itu, menurut Mayjen TNI (Purn) Tatang Zainudin sebagai salah seorang purnawirawan dalam wawancara :

Para purnawirawan secara garis komando tidak ada lagi kewenangan untuk memerintahkan para prajurit aktif untuk mendukung salah seorang rekan sesama purnawirawan pada pilpres 2019. Purnawirawan TNI juga diwajibkan untuk selalu menjaga netralitas TNI dalam kegiatan politik praktis.

Berdasarkan pernyataan Mayjen TNI (Purn) Tatang Zainudin ini selaku purnawirawan bahwasanya para purnawirawan secara garis komando tidak ada lagi kewenangan memerintahkan para prajurit. Jadi, setelah menjadi purnawirawan tidak bisa lagi memerintahkan kepada prajurit aktif untuk mendukung purnawirawan dan purnawirawan juga diwajibkan untuk menjaga netralitas TNI dalam kegiatan politik praktis.

Walaupun demikian, Dalam perjalanannya saat pemilihan presiden tahun 2019, salah seorang oknum prajurit Kodim 0501/JP-BS yakni Babinsa di Cideng, Tanah Abang sempat diduga tidak netral. Kejadian tersebut sempat viral dan heboh ditengah masyarakat. Kejadian tersebut sempat mencoreng nama baik TNI. Namun, peristiwa ini dibantah oleh Pjs Pasiintel Kodim 0501/JP-BS, Kapten Inf Tatang Supardi dalam wawancara²⁰:

Kejadian di Cideng tidak benar. Jadi kronologisnya bahwa babinsa baru datang. Dia datang ke rumah seseorang dan bertanya bagaimana ini kenapa ada gambar Soekarno. Akibat dari pernyataannya tersebut dibilang jika dia melakukan kampanye atau tidak netral. Padahal itu tidak ada. Hanya dimanfaatkan salah satu parpol untuk menjatuhkan TNI. Itu permainan-permainan tertentu.

Saat dimintai klarifikasi orang yang bilang atau orang yang mengatakan jika Babinsa tersebut berkampanye tidak mau dan dia sudah terbang ke Manado. Kita sudah jelaskan tapi

²⁰ Ibid

dia tidak sanggup dan ini menarik TNI ke ranah politik. Jangan membawa TNI kesitu. Saya tantangin. Saya undang 40 media ke kantor dan sekarang dia menghindar.

Dari kronologis kasus diatas, dapat dikatakan jika memang babinsa sering diisukan tidak netral hanya karena babinsa di Cideng, Tanah Abang, ini bertanya kenapa ada gambar Soekarno disebuah rumah warga. Padahal, tujuan babinsa tersebut tidak ada sedikitpun unsur politik. Bahkan yang lebih parahnya yakni akibat dari pernyataan babinsa tersebut ia dicurigai melakukan kampanye atau tidak netral lagi. Hingga akhirnya kasus tersebut hanya dimanfaatkan oleh salah satu partai politik untuk menjatuhkan TNI.

Terbukti, saat dimintai klarifikasi orang yang mengatakan jika babinsa tersebut berkampanye dia tidak mau dan sudah terbang ke Manado. Sedangkan, dari pihak Kodim 0501/JP-BS sudah menjelaskan kronologis kasus tersebut dengan mengundang 40 media ke markas Kodim 0501/JP-BS.

Melihat kejadian tersebut, hal seperti inilah yang sangat rentan terjadi dimana seakan-akan ada upaya untuk menarik kembali TNI ke ranah politik. Padahal, TNI sudah berupaya semaksimal mungkin untuk selalu jauh dari kegiatan politik. TNI masa reformasi tidak lagi memiliki ruang dan kesempatan untuk berpolitik. Sebab, politik TNI adalah politik negara.

Tidak hanya berlaku kepada prajurit, seluruh komponen ataupun pegawai nonmiliter yang ada dalam ruang lingkup Kodim 0501/JP-BS pun tetap melaksanakan komitmen untuk menjaga netralitas. Seperti wawancara salah satu pegawai administrasi Kodim 0501/JP-BS, Maulana dalam wawancara :

Pada saat pemilihan presiden tahun 2019 kemarin tidak ada arahan atau instruksi dari kantor untuk saya memilih salah satu calon tertentu. Namun, kalau secara personal ada prajurit yang terkadang suka memberi masukan terkait calon presiden.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen yang ada di Kodim 0501/JP-BS diberi kebebasan untuk memilih calon presiden 2019 tanpa adanya instruksi ataupun arahan dari personel Kodim 0501/JP-BS. Kalau untuk memberi masukan terkait calon presiden memang ada beberapa prajurit yang melakukannya, namun itu hanya secara personal dan sifatnya tidak memaksa.

Jadi, dapat disimpulkan jika secara umum, seluruh prajurit Kodim 0501/JP-BS beserta komponen yang ada dalam wilayah kerja Kodim 0501/JP-BS memberikan kemerdekaan untuk setiap individu memilih sesuai dengan pilihan masing-masing, tanpa adanya intervensi, instruksi ataupun arahan.

Komunikasi politik yang terbangun di wilayah Kodim 0501/JP-BS pun sangat lancar dengan tetap menjunjung tinggi netralitas selaku prajurit TNI serta tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional tanpa harus masuk ke ranah politik pada saat pemilihan umum presiden tahun 2019.

KESIMPULAN

Faktor yang membuat Kodim 0501/JP-BS tetap netral saat pemilihan presiden tahun 2019 ialah tidak lepas dari arahan yang dilakukan oleh para atasan untuk mengarahkan prajuritnya agar bersifat netral pada saat pemilihan presiden berlangsung. Setiap komandan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarga para prajurit dilingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif.

Jika prajurit Kodim 0501/JP-BS melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan para atasan wajib memberikan sanksi. Faktor-faktor tidak terlepas dari larangan-larangan yang diberlakukan oleh TNI seperti larangan bagi TNI untuk memberikan komentar, mendiskusikan, mengarahkan yang berkaitan dengan kontenstan pemilihan presiden kepada keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, anggota TNI tidak boleh menjadi anggota KPU, panwaslu, KPPS dan tidak boleh menjadi panitia pendaftaran pemilih. Setiap anggota TNI pun mendapatkan bimbingan berupa sosialisasi dan buku saku terhadap penerapan netralitas yang bertujuan agar TNI mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat pemilihan presiden tahun 2019 berlangsung. Hal ini yang juga dipegang oleh prajurit Kodim 0501/JP-BS.

Tantangan terhadap netralitas prajurit Kodim 0501/JP-BS cukup kuat disaat ada salah seorang purnawirawan TNI yang menjadi salah seorang konstestan dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Akan tetapi, walaupun purnawirawan TNI terlibat dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 sebagai salah satu calon presiden, tidak dapat mempengaruhi netralitas institusi Kodim 0501/JP-BS.

Untuk melakukan komunikasi politik di institusi Kodim 0501/JP-BS, media yang dipakai adalah pengumuman, selebaran dan instruksi yang datang dari atasan. Bentuk strategi komunikasi yang diterapkan oleh Kodim 0501/JP-BS adalah komunikasi satu arah dari atasan. Selain itu, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah agitasi dengan cara mengkomunikasikan semua pengumuman, selebaran dan instruksi tersebut kepada seluruh

prajurit melalui komunikasi secara langsung yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Kodim 0501/JP-BS

Tidak ada komunikasi tambahan dan setiap prajurit harus mematuhi. Alhasil, dengan strategi yang demikian prajurit Kodim 0501/JP-BS tetap menjaga netralitas. Memang, ditengah perjalanan ada indikasi prajurit Kodim 0501/JP-BS diduga tidak netral seperti yang dilakukan oleh oknum Babinsa di Cideng, namun hal tersebut tidak benar. Sepertinya harapan masyarakat terhadap netralitas TNI di Kodim 0510/JP-BS sudah terpenuhi. Kodim 0501/JP-BS sudah netral. Netralitas yang ada pada Kodim 0501/JP-BS juga berlaku bagi seluruh komponen yang bertugas, baik militer ataupun nonmiliter.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran kepada Kodim 0501/JP-BS untuk tetap terus mempertahankan pola komunikasi politik yang ada selama ini, yakni komunikasi politik satu arah dari pimpinan. Komunikasi politik yang dibangun selama ini di Kodim 0501/JP-BS sudah baik dan para prajurit pun mematuhi setiap komunikasi politik yang dilakukan dengan tidak melakukan komunikasi tambahan ataupun melakukan komunikasi sendiri-sendiri.

Karya penulisan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga kepada publik serta melengkapi kajian studi politik militer, khususnya di Indonesia pada era reformasi. semoga alur pemikiran dalam penulisan ini dapat bermanfaat untuk memprediksi berbagai situasi politik Indonesia ke depan dalam konteks hubungan sipil-militer. Penulisan ini juga hendaknya mendorong penulisan karya-karya lain yang lebih elaboratif untuk melihat perkembangan selanjutnya dari implementasi reformasi internal militer yang tengah berlangsung guna mewujudkan profesionalisme militer Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*, Jakarta: LPS, 1984

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Buku saku Netralitas TNI, Jakarta : Mabes TNI, 2008

Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983

Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York : Oxford University Press, 1960

Herdiansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Ster TNI dan PuSDeHaM, *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Ster TNI, 2007.

Widjojo, Agus, *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*, Jakarta: Grafindo, 2015.

Sumber Lain (Jurnal, Surat Kabar, dan sebagainya)

Arie S. Soesilo, *Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI*, dalam *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.